

Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antarwilayah

Riyanto
Hermanto Siregar

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu, pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya, perubahan dalam pengelolaan fiskal, yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah, belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya, pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, dana perimbangan, perekonomian daerah, panel data.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 serta berbagai peraturan yang mengikutinya. Sejak itu terjadi perubahan proses perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya, dan peningkatan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Adanya dana perim-

bangun ini merupakan perwujudan dari desentralisasi fiskal.

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan: (1) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (2) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; serta (3) mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah (UU No. 25/1999). Desentralisasi fiskal diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan peme-

rataan ekonomi daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan lebih merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU No.25/1999 mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sumber pembiayaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah, menurut UU ini, adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta pinjaman daerah dan sumber lain yang sah. Dana perimbangan meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) perorangan, penerimaan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dalam konteks desentralisasi, dana perimbangan merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Berdasarkan nilai rupiahnya, dana yang ditransfer ke daerah terutama ke kabupaten dan kota pada tahun 2001 mencapai Rp83,6 triliun. Sebagai perbandingan, dana yang ditransfer ke daerah pada tahun 1996/1997 hanya mencapai Rp17,8 triliun (Lampiran 1), yang secara nominal menunjukkan peningkatan hampir lima kali lipat. Lebih jauh lagi, terlihat bahwa daerah-daerah yang mengalami peningkatan dana transfer yang cukup besar adalah daerah-daerah yang kaya akan SDA, terutama Provinsi Riau dan Kalimantan Timur. Dilihat dari distribusinya, terjadi penurunan bagian dana transfer di Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Bali, NTT, dan Maluku; serta peningkatan bagian dana transfer di Sumatera, Kalimantan, dan NTB. Peningkatan bagian dana transfer di

Sumatera dan Kalimantan terjadi karena kedua pulau ini merupakan daerah penghasil komoditas-komoditas SDA yang cukup besar, yaitu Riau dan Kalimantan Timur. Selengkapnya, data tersebut mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 telah menyebabkan terjadinya pergeseran komposisi alokasi dana perimbangan di antara daerah-daerah.

Dengan tingginya alokasi dana perimbangan yang dialirkan dari pusat ke daerah, pada tataran makro diharapkan akan terjadi: (1) pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat, dan (2) pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Kondisi tersebut kemudian diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi nasional yang kokoh, yang ditopang oleh bangun ekonomi yang kuat pada tiap-tiap daerah. Masalahnya adalah, setelah kurang lebih empat tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, apakah dapat ditunjukkan bahwa telah terjadi pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah? Atau paling tidak, apakah dapat ditunjukkan bahwa arah kebijakan desentralisasi fiskal telah mencapai apa yang diharapkan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal, terutama dampak dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) dan DAU, terhadap perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antardaerah. Unit analisis pada penelitian ini adalah provinsi, dan untuk itu dilakukan agregasi data dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Ketika penelitian ini dilakukan, data yang tersedia untuk analisis dampak hanya sampai pada data

tahun 2001. Dengan tahun rujukan ini dan dengan agregasi yang dilakukan, jumlah observasi yang tersedia untuk digunakan relatif terbatas yaitu sebanyak 26 provinsi.

METODOLOGI

Kerangka Berpikir

Dalam ilmu makroekonomi, ukuran perekonomian yang paling lazim digunakan ialah produk domestik bruto (PDB). Pada tataran daerah, ukuran ini disebut produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB dapat dirinci menurut komponen pengeluaran, yaitu konsumsi (CONS), pengeluaran pemerintah (G), investasi (I) dan ekspor bersih (ekspor dikurang impor, X-M). Guna menetralkan perbedaan jumlah penduduk antardaerah, ukuran tersebut ditransformasi menjadi PDRB per kapita. Pemerataan pembangunan ekonomi antardaerah dapat dilihat dari sebaran atau variasi PDRB per kapita. Makin besar variasi PDRB per kapita, semakin tinggi pula ketidakmerataan pembangunan yang terjadi.

Peningkatan pengeluaran atau belanja pemerintah terhadap barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peningkatan yang cukup besar dalam APBD setiap daerah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang meningkat cukup besar dari Pemerintah Pusat ke daerah. Oleh karena itu, analisis dampak dana perimbangan terhadap perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antardaerah dapat dilakukan melalui

analisis hubungan antara blok perekonomian daerah (PDRB) yang terdiri dari CONS, I, G, dan ekspor netto, dengan blok keuangan daerah yang dicerminkan oleh APBD.

Dalam tinjauan ekonomi publik, belanja publik (*public expenditure*) merupakan instrumen untuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa publik misalnya jalan, jembatan, pertahanan dan keamanan, serta jasa-jasa pemerintahan lainnya. APBD merupakan belanja publik yang berfungsi untuk mengatasi kegagalan pasar dalam penyediaan barang dan jasa publik (Stiglitz 2000). Penyediaan barang publik memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Swasta tidak cukup punya insentif untuk menyediakan barang publik walau dengan barang publik tersebut berbagai aktivitas swasta (individu) menjadi lebih efisien.

Menurut Stiglitz (2000), program-program pembangunan daerah yang dapat dibiayai dengan belanja publik dapat berupa fisik (misalnya jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan) serta non-fisik (kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, peningkatan teknologi, dana sosial, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan). Oleh karena itu, dampak belanja publik tersebut terhadap perekonomian dapat dilihat melalui pengaruh alokasi dana APBD untuk program-program tersebut terhadap kinerja perekonomian daerah.

Untuk kasus di Indonesia, belanja publik yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah dalam APBD dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin

adalah pengeluaran untuk membayar gaji pegawai, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lain yang sejenis; sedangkan belanja pembangunan meliputi pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, diantaranya berupa penyediaan infrastruktur fasilitas publik misalnya jalan, jembatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Belanja pembangunan tersebut secara langsung diperuntukkan bagi peningkatan kinerja sektoral perekonomian daerah melalui alokasi kepada sektor-sektor perekonomian daerah. Besar nilai dan porsi belanja pembangunan inilah yang kemudian mempengaruhi sektor swasta dan menentukan perubahan perekonomian suatu daerah.

Selain ditentukan oleh besarnya belanja publik, peningkatan kinerja perekonomian daerah ditentukan juga oleh beberapa variabel antara lain: proses perencanaan pembangunan di daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas birokrasi pemerintahan di daerah yang ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (Stiglitz 2000). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Todaro (2000) mengemukakan bahwa besarnya dana perimbangan dan distribusi yang dibenkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah setelah desentralisasi barulah merupakan syarat perlu (*necessary condition*). Syarat cukupnya (*sufficient condition*) adalah bagaimana proses perencanaan dilakukan, bagaimana pengelolaan anggaran/keuangan di daerah, bagaimana respon pemerintah dan bagaimana sumber daya manusianya serta kelembagaan ekonomi yang ada di daerah.

Spesifikasi Model dan Metode Pendugaan

Analisis pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika. Hubungan antara dana perimbangan dengan perekonomian daerah dapat dispesifikasi dalam bentuk model sistem persamaan simultan. Persamaan-persamaan yang terkandung di dalam model dapat dikelompokkan ke dalam dua blok persamaan, yaitu blok perekonomian daerah dan blok keuangan daerah.

Blok perekonomian daerah terdiri atas lima variabel endogen atau lima persamaan, yaitu konsumsi privat, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor netto, dan PDRB atau permintaan agregat daerah yang bersangkutan. Blok keuangan daerah terdiri atas empat variabel endogen atau empat persamaan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pajak, pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran rutin. Adapun variabel eksogen untuk kedua blok tersebut ialah dana perimbangan, kualitas SDM, *bribery cost*, *crisis* (yang berawal dari krisis finansial Asia), dan variabel-variabel lain yang relevan menurut kerangka teori ekonomi makro. Hubungan antara blok perekonomian daerah dan blok keuangan daerah disajikan pada Lampiran 2, sedangkan spesifikasi persamaan pada setiap blok dituliskan sebagai berikut.

Blok Perekonomian Daerah

$$CONS = f(PDRB, POP, CONS_{-1}, EXP, Crisis, D_t)$$

$$G = f(EXP, EXR, PDRB, G_{-1}, Crisis, D_t)$$

$$I = f(Interest\ Rate, I_{-1}, EXP, EXR, PDRB, Bribery\ Cost, SDM, Crisis, D_t)$$

$$Net_{(X-M)} = f(ER, Net_{(X-M)_{-1}}, PDRB, IHK, Crisis, D_t)$$

$$PDRB = C + I + G + I + Net_{(X-M)}$$

Persamaan Konsumsi (CONS):

Persamaan struktural konsumsi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi privat. Total konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan atau output daerah (PDRB), jumlah penduduk (POP), konsumsi periode sebelumnya ($CONS_{t-1}$), dan pengeluaran rutin pemerintah daerah (EXR). Keempat variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap konsumsi. Variabel *crisis* merupakan variabel *dummy* untuk menangkap kondisi krisis ekonomi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997 (1984-1996=0, 1997-2001=1). Diduga, variabel *crisis* berdampak negatif terhadap tingkat konsumsi (CONS). D_1 merupakan variabel *dummy* desentralisasi untuk melihat perbedaan nilai konsumsi sebelum dan setelah penerapan desentralisasi fiskal, serta perbedaan respon pengeluaran rutin dalam APBD terhadap konsumsi sebelum dan setelah desentralisasi (1984-2000=0, 2001=1). D_2 diduga berpengaruh positif terhadap nilai konsumsi (CONS), dan respon konsumsi akibat belanja rutin pemerintah setelah desentralisasi fiskal diduga lebih besar dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal.

Persamaan Pengeluaran Pemerintah

(G): Persamaan struktural pengeluaran pemerintah (G) memberikan penjelasan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh belanja pembangunan daerah (EXP), belanja rutin daerah (EXR), pendapatan atau output daerah (PDRB), pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya, D_1 , dan *crisis*. Kecuali yang terakhir, semua variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengeluaran pemerintah.

Persamaan Investasi (I): Persamaan struktural investasi menunjukkan bahwa investasi suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (IR), belanja pembangunan daerah (EXP), belanja rutin (EXR), investasi satu tahun sebelumnya (I_{t-1}), pendapatan atau output daerah (PDRB), *bribery cost*, kualitas sumber daya manusia (SDM), D_1 , dan *crisis*. Variabel suku bunga, *bribery cost*, dan *crisis* diduga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap investasi, sementara variabel-variabel lainnya diduga mempunyai pengaruh sebaliknya.

Persamaan Ekspor Netto (X-M):

Persamaan struktural ekspor netto menjelaskan bahwa ekspor bersih suatu daerah dipengaruhi oleh nilai tukar (ER), ekspor netto satu periode sebelumnya, PDRB, IHK (Indeks Harga Konsumen) di daerah tersebut, D_1 dan *crisis*. Semua variabel tersebut diduga berpengaruh positif terhadap ekspor netto suatu daerah, kecuali variabel impor (M_{t-1}), IHK, dan *crisis*.

Persamaan Permintaan Agregat (PDRB): Persamaan PDRB merupakan persamaan identitas, dimana PDRB suatu daerah merupakan penjumlahan dari komponen permintaan daerah, yakni keempat variabel endogen di atas.

Blok Keuangan Daerah:

$$PAD = f(PAJAK, PAD_{t-1}, D_1)$$

$$PAJAK = f(PDRB, PAJAK_{t-1}, D_1)$$

$$EXP = f(PAD, DAU, BHP, BHBP, EXP_{t-1}, D_1)$$

$$EXR = f(PAD, DAU, BHP, BHBP, EXR_{t-1}, D_1)$$

Persamaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD): Persamaan struktural PAD menjelaskan hubungan antara PAD dengan tingkat pajak yang mampu dikumpulkan pemerintah daerah (PAJAK), besarnya investasi di daerah tersebut (I), PAD satu

 PERPUSTAKAAN FISAT
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

periode sebelumnya (PAD_{t-1}), serta D_{t-1} . Semua variabel tersebut diduga berpengaruh positif terhadap PAD.

Persamaan Penerimaan Pajak (PAJAK): Persamaan struktural PAJAK menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah dengan pendapatan atau output daerah (PDRB), pajak satu periode sebelumnya ($PAJAK_{t-1}$), serta D_{t-1} . Diduga semua variabel ini berpengaruh positif terhadap PAJAK.

Persamaan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah (EXP): Persamaan struktural EXP menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan oleh pemerintah daerah ditentukan oleh PAD, dana alokasi umum (DAU), bagi hasil pajak (BHP), bagi hasil non-pajak (BHBP), pengeluaran pembangunan tahun sebelumnya (EXP_{t-1}), dan D_{t-1} . Semua variabel tersebut diduga berpengaruh positif terhadap pengeluaran pembangunan daerah.

Persamaan Pengeluaran Rutin Pemerintah (EXR): Persamaan struktural EXR menjelaskan bahwa pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah daerah ditentukan oleh PAD, dana alokasi umum (DAU), bagi hasil pajak (BHP), bagi hasil non-pajak (BHBP), pengeluaran pembangunan tahun sebelumnya (EXP_{t-1}), dan D_{t-1} . Semua variabel tersebut diduga berpengaruh positif terhadap pengeluaran rutin daerah.

Setiap variabel yang ada dalam model, kecuali variabel *dummy*, dispesifikasi dalam bentuk logaritma. Bentuk pengaruh variabel *dummy* terhadap variabel endogen dapat melalui intersep dan/atau melalui koefisien regresi (*slope*) variabel penjelas tertentu. Untuk bentuk pengaruh terakhir, variabel *dummy* bersangkutan

diinteraksikan dengan variabel penjelas yang dipandang relevan.

Metode Estimasi, Jenis Data dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan untuk menduga atau mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel (*pooling cross section-time series regression*). Dalam pendekatan ini, data disusun dalam bentuk gabungan yaitu kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Keuntungan pendekatan ini menurut Baltagi (1995) antara lain:

- a. untuk mengendalikan keheterogenan individu,
- b. memberikan informasi yang lebih kaya, *less collinearity* di antara variabel-variabel penjelas, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien,
- c. data panel lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur *effect* yang tidak bisa dideteksi dalam model data *cross section* atau *time series*, dan
- d. data panel sangat sesuai untuk mempelajari dan menguji perilaku model yang kompleks dibandingkan model data *cross section* atau data *time series*.

Berbeda dengan model regresi yang biasanya diestimasi dengan teknik kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares*), kebanyakan estimasi regresi data panel mengasumsikan $u_{it} = \mu_i + v_{it}$ dimana μ_i merupakan *unobservable individual specific effect*. Berkaitan dengan spesifikasi μ_i , ada dua model untuk panel data yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Spesifikasi model *fixed effect* digunakan jika kita menerapkan model tersebut hanya untuk *cross-sectional unit* yang tercakup dalam studi kita. Sementara itu,

spesifikasi *random effect* digunakan jika *cross-sectional unit* yang digunakan dalam studi merupakan sampel yang diambil dari populasi yang besar (Greene 2000; Baltagi 1995).

Karena unit analisis (observasi) dalam penelitian ini adalah provinsi dan seluruh provinsi menjadi sampel maka metode estimasi yang digunakan adalah metode yang dipandang sesuai dengan spesifikasi *fixed effect*. Di antara metode tersebut, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *least square dummy variable* (LSDV) dan *generalized least squares* (GLS) dengan *cross section weight*. GLS dengan *cross section weight* pada dasarnya dapat diterapkan untuk model panel data dengan *random effect* dan *fixed effect* (Eviews 1998). Penggunaan *random* dan *fixed effect* biasanya dihubungkan dengan apakah data yang digunakan merupakan sampel lengkap atau sampel tidak lengkap (Baltagi 1995).

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 26 provinsi masing-masing delapan tahun (1984 – 2001). Nama ke-26 provinsi tersebut tercantum pada kolom pertama Lampiran 3. Definisi operasional setiap variabel disajikan pada Lampiran 4. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Departemen Keuangan.

DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

Dalam penelitian ini, variabel dana perimbangan (DAPER) dipandang sebagai proksi dari besaran (*magnitude*) kebijakan desentralisasi fiskal. Jika dilihat dari kontribusi dana perimbangan terhadap kemampuan pembiayaan di daerah, terlihat

bahwa dana perimbangan ini masih merupakan sumber dana yang sangat penting bagi daerah. Secara rata-rata, sumbangan kepada total penerimaan daerah mencapai 80 persen (Lampiran 5), hampir tidak berbeda dengan kondisi sebelum kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, pembiayaan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal masih sangat tergantung pada dana dari pusat, kendati usaha ke arah peningkatan PAD sudah dilakukan. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah secara rata-rata hanya berkisar 11 persen.

Rasio dana perimbangan terhadap total pengeluaran pemerintah daerah rata-rata sebesar 81 persen, dan sebagian besar digunakan oleh daerah untuk membiayai belanja rutin. Mengingat relatif kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah dan besarnya proporsi dana perimbangan yang digunakan untuk belanja rutin, maka belanja pembangunan (sebagai faktor yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah) yang tersedia juga relatif kecil.

Dampak terhadap Perekonomian Daerah

Analisis dampak dana perimbangan terhadap perekonomian daerah dibagi menjadi: dampak terhadap keuangan daerah (Tabel 1) dan dampak terhadap kinerja perekonomian daerah (Tabel 2). Dari persamaan pengeluaran pembangunan (EXP) dan pengeluaran rutin (EXR) terlihat bahwa dana perimbangan berpengaruh positif (signifikan dengan taraf nyata 5 persen) terhadap komponen pengeluaran rutin (EXR) dan pembangunan (EXP). Setelah desentralisasi fiskal berjalan, pengeluaran rutin tersebut

Tabel 1
Hasil Pendugaan Model Persamaan Blok Keuangan Daerah

Persamaan	Dependent Variable	Independent Variable	Koefisien	Nilai-P	R-Square	DW	Teknik Estimasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Log(PAD)	LOG(PAJAK)	0,774	0,000	0,999	2,149	GLS
		LOG(I)	0,081	0,000			
		D1	1,011	0,000			
		D1*LOG(PAJAK)	-0,140	0,000			
		D1*LOG(I)	0,124	0,000			
		AR(1)	0,892	0,000			
Pajak	Log(PAJAK)	LOG(PDRB)	0,835	0,001	0,979	2,065	LSDV
		D1	-0,995	0,146			
		D1*LOG(PDRB)	0,085	0,048			
		AR(1)	0,946	0,000			
Pengeluaran Pembangunan	Log(EXP)	LOG(PAD)	0,172	0,000	0,999	1,945	GLS
		LOG(DAPER)	1,018	0,000			
		D1	-3,427	0,003			
		D1*LOG(PAD)	-0,144	0,007			
		D1*LOG(DAPER)	0,251	0,004			
		AR(1)	0,656	0,000			
Pengeluaran Rutin	LOG(EXR)	LOG(DAPER)	0,572	0,000	0,986	1,955	LSDV
		LOG(PAD)	0,419	0,000			
		D1	3,383	0,000			
		D1*LOG(DAPER)	-0,150	0,000			
		AR(1)	0,421	0,000			

Keterangan : PAD = pendapatan asli daerah; PAJAK = pajak; I = investasi; PDRB = produk domestik regional bruto; EXP = pengeluaran pembangunan; EXR = pengeluaran rutin; DAPER = dana perimbangan; D1 = dummy desentralisasi (0 = sebelum; 1 = setelah)

naik (bergeser ke atas), sedangkan pengeluaran pembangunan bergeser ke bawah. Hal ini terlihat dari koefisien variabel *dummy* desentralisasi fiskal (D_1) yang signifikan pada kedua persamaan tersebut.

Pengaruh interaksi antara D_1 dengan dana perimbangan terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan juga signifikan, seperti ditunjukkan oleh respon (*slope*) belanja pembangunan akibat peningkatan dana perimbangan

yang lebih tinggi setelah desentralisasi dibandingkan sebelum desentralisasi. Sebaliknya, respon (*slope*) belanja rutin akibat kenaikan dana perimbangan lebih rendah setelah desentralisasi. Hal ini berarti pada awal desentralisasi fiskal, belanja rutin meningkat cukup besar dibandingkan belanja pembangunan. Slope belanja pembangunan positif dan signifikan, sedangkan slope belanja rutin negatif dan signifikan akibat peningkatan dana perimbangan. Hal ini berarti belanja

Tabel 2
Hasil Pendugaan Model Persamaan Blok Perekonomian Daerah

Persamaan	Dependent Variable	Independent Variable	Koefisien	Nilai-P	R-Square	DW	Teknik Estimasi
Konsumsi	Log(CONS)	LOG(PDRB)	0,089	0,000	0,999	1,92	GLS
		LOG(CONS(-1))	0,857	0,000			
		LOG(POP)	0,016	0,437			
		LOG(EXR)	0,023	0,006			
		CRISIS	-0,025	0,000			
		D1	-0,107	0,636			
		D1*LOG(EXR)	0,005	0,666			
Pengeluaran Pemerintah	LOG(G)	LOG(AP8D)	0,044	0,007	0,999	1,69	GLS
		LOG(PDRB)	0,418	0,000			
		D1	-0,005	0,986			
		D1*LOG(AP8D)	0,001	0,945			
		AR(1)	0,897	0,000			
Investasi	LOG(I)	LOG(EXP)	0,091	0,000	0,999	2,07	GLS
		LOG(EXR)	-0,001	0,960			
		LOG(I(-1))	0,767	0,000			
		LOG(IR)	-0,129	0,000			
		LOG(SDM_D3S3)	0,029	0,179			
		LOG(BRIBERY)	-0,015	0,281			
		CRISIS	-0,798	0,005			
		CRISIS*LOG(EXP)	-0,049	0,000			
		D1	-0,157	0,754			
		D1*LOG(EXP)	0,009	0,681			
Net Ekspor	Log(Net(X))	LOG(PDRB)	0,573	0,000	0,999	1,61	GLS
		LOG(NET_EXP(-1))	0,383	0,000			
		LOG(IHK)	-0,367	0,013			
		LOG(ER)	0,127	0,262			
		CRISIS	0,004	0,966			
		D1	0,029	0,639			

Keterangan : POP = populasi; CONS = konsumsi; G = pengeluaran pemerintah; I = investasi; Net (X) = ekspor dikurangi impor; Crisis = dummy krisis (0 = sebelum krisis 1998; 1 = setelah krisis); IR = suku bunga; SDM_D3S3 = proporsi penduduk yang lulus D3-S3; BRIBERY = tingkat penyogokan/suap ; HK = indeks harga konsumen; ER = nilai tukar

pembangunan akan meningkat besar jika dana perimbangan juga sangat besar, karena belanja rutin sudah dipenuhi. Namun demikian, dengan dana perimbangan yang sekarang diterima, pemerintah daerah masih mengutamakan pengeluaran rutin.

Selanjutnya, belanja pembangunan (EXP) dan belanja rutin (EXR) tersebut mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam komponen PDRB. Belanja pembangunan (EXP) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap komponen pengeluaran pemerintah dan investasi. Tetapi dengan melihat koefisien variabel *dummy* untuk desentralisasi (D_1) dan interaksi *dummy* (D_1) dengan belanja pembangunan yang tidak signifikan, maka pengaruh belanja pembangunan pemerintah terhadap komponen perekonomian tidak berbeda sebelum dan setelah desentralisasi. Belanja rutin (EXR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi (CONS) dan pengeluaran pemerintah (G), tetapi berpengaruh negatif terhadap investasi. Koefisien variabel *dummy* desentralisasi maupun interaksinya dengan belanja rutin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh belanja rutin tersebut sebelum dan setelah desentralisasi.

Hasil-hasil di atas menunjukkan dana perimbangan memang secara signifikan telah meningkatkan keuangan atau anggaran pemerintah daerah (APBD) setelah desentralisasi, tetapi tidak berbeda pengaruhnya terhadap perekonomian jika dibandingkan dengan dana transfer sebelum desentralisasi. Jadi, peningkatan dana transfer yang besar melalui instrumen dana perimbangan belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan.

Secara empiris, data PDRB aktual 2001 (harga konstan tahun 1993) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap daerah secara rata-rata tidak lebih baik dibandingkan tahun 1996. Padahal, dana yang mengalir ke daerah pada tahun 2001 jauh lebih besar dibandingkan tahun 1996. Memang, desentralisasi fiskal berlangsung dalam kondisi krisis ekonomi yang belum pulih sampai tahun 2001 jika dibandingkan kondisi perekonomian pada tahun 1996. Akan tetapi jika diban-

dingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1997, saat krisis mulai melanda, pertumbuhan ekonomi setiap daerah pun pada tahun 2001 tidak lebih baik. Hal ini konsisten dengan model ekonometrika yang juga memberikan indikasi bahwa desentralisasi fiskal belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah kembali ke keadaan seperti sebelum krisis ekonomi (Lampiran 3).

Melihat hasil analisis ekonometrika dan data aktual tersebut, maka masih terlalu dini dan sulit mengharapkan instrumen dana perimbangan mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah, apalagi menciptakan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kenyataannya, dana perimbangan yang besar tersebut hanya sampai untuk meningkatkan blok keuangan daerah dan tidak sampai untuk meningkatkan blok perekonomian daerah. Hal ini disebabkan paling tidak oleh dua hal. Pertama, masih besarnya porsi belanja rutin. Sejak desentralisasi belanja untuk gaji pegawai meningkat cukup besar, termasuk gaji anggota DPRD. Sidik, et.al. (2002) menunjukkan bahwa perilaku *rent seeking* di daerah meningkatkan biaya dalam mengorganisasikan *rent based transfer* pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota untuk memperkuat struktur kekuatan elit politik di daerah, sehingga sebagian besar dana perimbangan yang mengalir ke daerah hanya dinikmati oleh elit di daerah tersebut.

Kedua, ada beberapa syarat kecukupan (*sufficient conditions*) yang belum dipenuhi oleh daerah, antara lain yang terkait erat dengan bagaimana proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dalam era desen-

tralisasi ini. Jika dana perimbangan yang mengalir ke daerah tidak dibarengi dengan proses perencanaan yang baik dengan prinsip partisipatif (pelibatan masyarakat), kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, dan tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maka dana yang besar tersebut tidak akan punya dampak berarti bagi perekonomian masyarakat daerah tersebut karena hanya dinikmati oleh elit daerah.

Dampak terhadap Pemerataan Pembangunan Wilayah

Ukuran pemerataan pembangunan wilayah yang digunakan adalah ukuran variasi PDRB per kapita antardaerah. Makin kecil variasi PDRB per kapita, makin merata pembangunan antardaerah atau wilayah, dan sebaliknya. Ukuran variasi yang digunakan dapat berupa standar deviasi, jarak (selisih nilai maksimum dengan minimum) dan koefisien variasi. Analisis dimulai dengan membandingkan data aktual PDRB per kapita tahun 1996 dan 1997 untuk periode sebelum desentralisasi, dan tahun 2001 untuk periode setelah desentralisasi. Kemudian analisis dilanjutkan dengan melakukan simulasi dampak masing-masing komponen dana perimbangan terhadap pemerataan pendapatan per kapita.

Berdasarkan data aktual PDRB per kapita tahun 1996, 1997, dan 2001 (Tabel 3), dapat dilihat keragaman ukuran pemerataan pendapatan dengan melihat ukuran variasi PDRB per kapita sebelum desentralisasi (tahun 1996 dan 1997) dan setelah desentralisasi (tahun 2001). Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2001 tidak ada perbaikan pemerataan penda-

patan per kapita antardaerah. Hal ini terlihat dari ukuran variasi, yaitu standar deviasi, jarak, dan koefisien variasi, PDRB per kapita tahun 2001 (setelah desentralisasi) yang lebih besar dibandingkan ukuran variasi PDRB per kapita tahun 1996 dan tahun 1997. Namun demikian belum dapat disimpulkan apakah tidak membaiknya pemerataan tersebut disebabkan oleh dana perimbangan atau faktor lain. Hasil ini juga belum secara khusus melihat peranan dana perimbangan itu sendiri terhadap pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu dilakukan simulasi berdasarkan hasil dugaan parameter yang telah disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Simulasi dilakukan untuk melihat dampak komponen dana perimbangan terhadap variasi PDRB per kapita setiap daerah. Ada tiga jenis simulasi yang dilakukan yaitu simulasi bagi hasil, simulasi DAU, dan simulasi bagi hasil+DAU. Simulasi bagi hasil dilakukan dengan hanya memasukkan komponen bagi hasil dari dana perimbangan, simulasi DAU dilakukan dengan hanya memasukkan DAU ke dalam model, dan simulasi dana perimbangan (bagi hasil+DAU+DAK) dilakukan dengan memasukkan seluruh komponen dana perimbangan secara bersama-sama. Hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dana perimbangan berdampak pada perbaikan pemerataan pembangunan antarwilayah. Hal tersebut terlihat dari koefisien variasi pendapatan per kapita pada seluruh hasil simulasi. Koefisien variasi pada simulasi dana perimbangan (63,88 persen), simulasi bagi hasil (66,22 persen), dan simulasi DAU (63,08 persen) lebih kecil dari koefisien variasi aktual tahun 2001 (85,05

Tabel 3
PDRB per Kapita Setiap Daerah dan Ukuran Variasinya

Provinsi	1996	1997	2001
Nanggroe Aceh Darussalam	2,91	2,84	2,20
Sumatera Utara	2,10	2,19	2,08
Sumatera Barat	1,73	1,80	1,84
Riau	4,88	4,87	4,56
Jambi	1,28	1,29	1,40
Sumatera Selatan	1,82	1,87	1,86
Bengkulu	1,15	1,15	1,24
Lampung	1,02	1,04	1,07
DKI Jakarta	7,08	7,30	7,06
Jawa Barat	1,70	1,75	1,65
Jawa Tengah	1,40	1,43	1,31
DI Yogyakarta	1,75	1,82	1,60
Jawa Timur	1,81	1,87	1,63
Bali	2,44	2,57	2,38
Nusa Tenggara Barat	0,86	0,89	1,19
Nusa Tenggara Timur	0,74	0,77	0,75
Kalimantan Barat	1,80	1,89	1,90
Kalimantan Tengah	2,39	2,47	2,24
Kalimantan Selatan	2,01	2,06	2,18
Kalimantan Timur	8,15	8,17	9,13
Sulawesi Utara	1,33	1,38	1,47
Sulawesi Tengah	1,11	1,13	1,16
Sulawesi Selatan	1,23	1,27	1,30
Sulawesi Tenggara	0,95	0,97	0,95
Maluku	1,39	1,41	1,04
Papua	3,46	3,60	3,72
Rata-Rata	2,25	2,30	2,27
Standar Deviasi	1,82	1,84	1,93
Minimum	0,74	0,77	0,75
Maximum	8,15	8,17	9,13
Jarak	7,41	7,40	8,38
Koefisien Variasi	80,83	79,87	85,05

Sumber : Diolah dan data PDRB, BPS beberapa tahun penerbitan

persen). Artinya, walaupun secara aktual pemerataan pembangunan wilayah pada tahun 2001 tidak menunjukkan perbaikan, hasil simulasi model menunjukkan bahwa dana perimbangan dapat memperbaiki pemerataan pembangunan antarwilayah.

Temuan di atas mengindikasikan bahwa tidak berubahnya pemerataan pembangunan secara aktual pada tahun 2001 lebih disebabkan oleh faktor di luar dana perimbangan, misalnya faktor historis atau pengaruh masa lalu yang

memang terus mempengaruhi kondisi perekonomian setiap daerah. Ini sejalan dengan Stiglitz (1991, p26) yang menyatakan "...*history itself (brings) individuals (to) know more about the institutions with which they have lived in the recent past than they know of others by which they might live*". Daerah yang dulunya diuntungkan secara ekonomi akan terus mempunyai pendapatan per kapita yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang dulunya terbelakang. Jadi dampak dana perim-

Tabel 4
PDRB per Kapita Hasil Simulasi Tahun 2001 (Harga Konstan 1993)
dan Ukuran Pemerataannya

Provinsi	Jenis Simulasi		
	Dana perimbangan	Bagi hasil	DAU
DI Aceh	2,22	2,24	2,22
Sumut	2,13	2,15	2,14
Sumbar	2,24	2,20	2,25
Riau	3,59	3,67	3,57
Jambi	1,69	1,67	1,70
Sumsel	1,80	1,82	1,80
Bengkulu	1,74	1,68	1,75
Lampung	1,06	1,06	1,07
Jakarta	6,16	6,31	6,05
Jabar	2,08	2,08	2,08
Jateng	1,84	1,81	1,85
DI Yogyakarta	1,79	1,75	1,80
Jatim	1,93	1,91	1,94
Bali	2,91	2,91	2,92
NTB	1,22	1,21	1,22
NTT	0,71	0,67	0,72
Kalbar	1,86	1,83	1,87
Kalteng	2,28	2,26	2,29
Kalsel	2,14	2,15	2,14
Kaltim	7,08	7,27	7,05
Sulut	1,79	1,73	1,79
Sulteng	1,31	1,28	1,32
Sulsel	1,50	1,47	1,50
Sultra	1,20	1,16	1,21
Maluku	1,21	1,19	1,21
Irian Jaya	3,43	3,43	3,44
Rata-rata	2,27	2,27	2,27
Stdev	1,45	1,50	1,43
Min	0,71	0,67	0,72
Max	7,08	7,27	7,05
Jarak	6,37	6,59	6,33
Koefisien Variasi	63,88	66,22	63,08

Sumber: Hasil Simulasi Model Ekonometrika

bangan terhadap perbaikan pemerataan pembangunan wilayah pada masa mendatang cukup menjanjikan, asalkan distribusi alokasi dana perimbangan terus diperbaiki dan ada perlakuan khusus terhadap peningkatan pembangunan wilayah-wilayah yang masih terbelakang.

Perbaikan terhadap distribusi alokasi dana perimbangan dapat dilakukan melalui instrumen DAU. Menurut hasil

simulasi, komponen DAU inilah yang lebih mampu memperbaiki pemerataan pembangunan wilayah dibandingkan komponen bagi hasil. Hal ini karena simulasi DAU memberikan koefisien variasi yang paling kecil. Dengan demikian pada masa yang akan datang, alokasi DAU harus benar-benar mempertimbangkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah sehingga daerah-daerah yang sudah

memperoleh bagi hasil pajak maupun bagi hasil SDA yang cukup besar tidak lagi diberikan DAU yang besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang tidak memperoleh atau sedikit memperoleh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA harus memperoleh DAU yang relatif cukup besar. Memang dalam konteks ini pemerataan pembangunan wilayah menjadi sangat tergantung pada DAU. Akan tetapi, persoalan ketergantungannya bukan pada besarnya DAU tetapi pada distribusi alokasi DAU itu sendiri.

Jadi untuk menjamin perbaikan pemerataan pembangunan wilayah, distribusi alokasi DAU yang harus diperbaiki adalah dengan menerapkan formula DAU secara konsisten. Penambahan DAU bisa bersifat disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Sementara itu, percepatan pembangunan wilayah-wilayah yang terbelakang dapat dilakukan dengan instrumen dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian, peranan dana perimbangan secara keseluruhan dalam memperbaiki pemerataan pembangunan wilayah dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

- a. Tidak berbeda dengan kondisi sebelum desentralisasi fiskal, porsi dana perimbangan rata-rata mencapai sekitar 80 persen dari penerimaan daerah. Jadi dana perimbangan masih merupakan sumber utama penerimaan daerah.
- b. Berdasarkan hasil analisis dengan model ekonometrika ditemukan bahwa setelah desentralisasi fiskal,

dampak dana perimbangan cukup signifikan meningkatkan anggaran pemerintah daerah (APBD), tetapi tidak berdampak secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh belanja rutin yang masih dominan dalam komponen APBD, kemungkinan terjadinya birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, dan proses perencanaan pembangunan di daerah yang kurang baik.

- c. Dengan menggunakan analisis kondisi riil dan simulasi model ekonometrika untuk analisis dampak pemerataan, dapat disimpulkan bahwa dampak dana perimbangan belum mencapai kondisi pemerataan pembangunan wilayah walau secara fiskal terjadi pemerataan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan antarpemerintah daerah. Hal ini karena dana perimbangan tersebut belum secara signifikan memperbaiki kesenjangan pendapatan (PDRB) antardaerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil simulasi setiap komponen dana perimbangan juga menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak membuat ketidakmerataan semakin besar. Hal ini diduga disebabkan oleh bagi hasil pajak yang bias ke perkotaan dan ketidakmerataan potensi sumber daya alam antardaerah. Namun ketimpangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil pajak dan non pajak tersebut dapat direduksi dengan adanya DAU. Walau belum sepenuhnya berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah,

DAU diharapkan mampu berperan lebih besar sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong pemerataan pembangunan antardaerah di masa mendatang. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kesenjangan perekonomian antardaerah dan pertumbuhan ekonomi daerah bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya dana perimbangan di suatu daerah. Investasi, yang nilai dari penyebarannya sangat terbatas, juga merupakan faktor penyebab kesenjangan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam memberikan dampaknya pada peningkatan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan wilayah, direkomendasikan hal-hal berikut :

- a. Belum mampunya dana perimbangan dalam mengurangi kesenjangan perekonomian antardaerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan proses perumusan pemanfaatan dana perimbangan yang cenderung tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas (Riyanto 2003). Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat perlu mendorong proses perencanaan pembangunan daerah ke arah proses yang partisipatif sehingga alokasi dana pembangunan daerah dalam APBD sesuai dengan kehendak masyarakat lokal. Untuk itu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses perencanaan yang partisipatif perlu terus dilakukan. Kerjasama antara LSM dan

universitas di masa depan perlu dikembangkan agar proses perencanaan partisipatif ini benar-benar terjadi. Sebesar apapun dana yang ditransfer ke daerah, dana tersebut menjadi kurang bermanfaat bagi kepentingan daerah dan masyarakat jika tidak diikuti dengan proses perencanaan yang tepat.

- b. Untuk meningkatkan investasi swasta, pemerintah daerah selangkah tidak meningkatkan pungutan pajak dan redistribusi (resmi atau tidak resmi) dengan dalih peningkatan PAD. Yang seharusnya dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah bahkan seharusnya memberikan insentif bagi investor, melalui kemudahan perijinan, pemberian potongan pajak, perbaikan infrastruktur perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
- c. Pemerintah daerah, dengan partisipasi dan kontrol masyarakat, seyogyanya membuat alokasi dana APBD lebih banyak ke pengeluaran pembangunan yang secara langsung berdampak bagi peningkatan ekonomi lokal. Caranya adalah dengan membuat birokrasi pemerintahan yang lebih efisien, melalui struktur pemerintahan yang ramping, serta meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penggunaan belanja pemerintah daerah untuk mengurangi korupsi dan perilaku *rent seeking*.

d. Untuk mewujudkan keadilan, transparansi dan akuntabilitas, proses alokasi dana perimbangan seharusnya dilakukan secara transparan. DAU dan dana bagi hasil pajak dan SDA masih banyak menimbulkan kecuri-

gan berbagai daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat bertugas untuk terus menyempurnakan mekanisme dan proses alokasi dana perimbangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

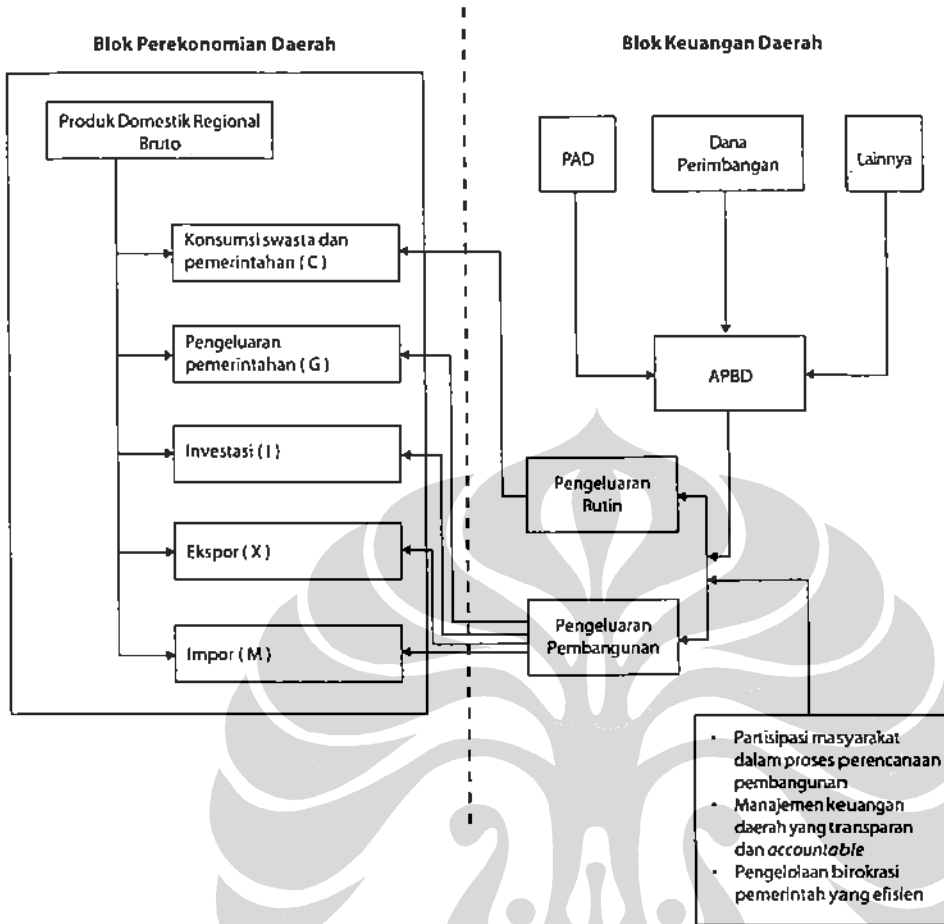
- Anonim (2000), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999", Jakarta.
- Anonim (2000), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999", Jakarta.
- Baltagi, B. H. (1995), *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
- Eviews (1998), *Eviews 3.1: User Guide*, Quantitative Micro Software, Irvine, CA, USA.
- Greene, W.H. (2000), *Econometric Analysis*, 4th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.
- Riyanto (2003), "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia", Tesis pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Sidik, Mahfud, Robert A. Simanjuntak, Raksaka Mahi dan Bambang Brodjonegoro (2002), *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Stiglitz, J. E. (1991), "Rational Peasants, Efficient Institutions, and a Theory of Rural Organization: Methodological Remarks for Development Economists: The Future Perspective", in Pranab Bardhan (ed) (1991), *The Economic Theory of Agrarian Institutions*, Clarendon Press, London.
- Stiglitz, J. E. (2000), *Economics of the Public Sector*. 3rd edition, W.W. Norton & Company, New York.
- Todoro, P.M. (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Lampiran 1.
Perbandingan Dana Bagi Hasil (Pajak dan Non Pajak), SDO, Inpres
Sebelum Desentralisasi Fiskal (Tahun 1996/1997) dengan Dana Perimbangan
Setelah Desentralisasi Fiskal (Tahun 2001)

Provinsi	1996/1997		2001		Perubahan 2001 - 1996/1997	
	Nilai (Milyar)	Distribusi (%)	Nilai (Milyar)	Distribusi (%)	Nilai (Milyar)	Distribusi (%)
DI Aceh	482,42	2,71	3 071,79	3,67	2 589,37	0,96
Sumut	1 026,11	5,76	3 878,85	4,64	2 852,74	-1,12
Sumbar	472,34	2,65	2 021,20	2,42	1 548,86	-0,23
Riau	538,47	3,02	6 700,79	8,01	6 162,32	4,99
Jambi	333,45	1,87	1 253,89	1,50	920,44	-0,37
Sumsel	718,32	4,03	2 559,20	3,06	1 840,88	-0,97
Bengkulu	210,78	1,18	748,686	0,90	537,91	-0,28
Lampung	465,05	2,61	2 104,76	2,52	1 639,71	-0,09
Bangka Belitung	-	-	422,427	0,51	422,43	0,51
Total Sumatera	4246,94	23,84	22761,59	27,22	18514,65	3,38
DKI Jakarta	771,87	4,33	3 684,46	4,41	2 912,59	0,08
Jabar	2 258,64	12,68	7 766,05	9,29	5 507,41	-3,39
Jateng	1 961,25	11,01	8 858,46	10,59	6 897,21	-0,42
DI Yogyakarta	292,15	1,64	1 204,51	1,44	912,36	-0,20
Jatim	2 065,43	11,59	10 036,14	12,00	7 970,71	0,41
Banten	-	-	1 672,11	2,00	1 672,11	2,00
Total Jawa	7349,34	41,25	33221,72	39,73	25872,38	-1,52
Kalbar	470,49	2,64	1 728,81	2,07	1 258,32	-0,57
Kalteng	424,65	2,38	1 487,61	1,78	1 062,96	-0,60
Kalsel	454,35	2,55	1 559,34	1,87	1 104,99	-0,68
Kalim	606,99	3,41	6 521,86	7,80	5 914,87	4,39
Total Kalimantan	1956,49	10,98	11297,63	13,51	9341,14	2,53
Sulut	376,83	2,11	870,18	1,04	493,35	-1,07
Sulteng	329,81	1,85	1 162,65	1,39	832,84	-0,46
Sulsel	805,84	4,52	3 240,51	3,88	2 434,67	-0,64
Sultra	265,23	1,49	957,944	1,15	692,71	-0,34
Gorontalo	-	-	421,555	0,50	421,56	0,50
Total Sulawesi	1777,72	9,98	6652,84	7,96	4875,12	-2,02
Bali	353,84	1,99	1 659,60	1,98	1 305,76	-0,01
NTB	327,37	1,84	1 576,90	1,89	1 249,53	0,05
NTT	485,31	2,72	2 227,18	2,66	1 741,87	-0,06
Maluku	335,57	1,88	451,77	0,54	116,20	-1,34
Maluku Utara	-	-	568,75	0,68	568,75	0,68
Irija	743,72	4,17	3 284,05	3,93	2 540,33	-0,24
TOTAL	17817,97	100	83610,73	100,00	65792,76	

Sumber : APBD DATU dan II Tahun 1996, APBD Kab/Kota dan APBD Propinsi Tahun 2001, Departemen Keuangan RI.

Lampiran 2.
Hubungan Blok Perekonomian Daerah dengan Blok Keuangan Daerah



Lampiran 3.
Pertumbuhan PDRB Setiap Daerah Tahun 1996/1997 dan Tahun 2001

Provinsi	1996	1997	2001
Nanggroe Aceh Darussalam	2,47	-0,16	1,19
Sumatera Utara	9,01	5,70	3,65
Sumatera Barat	7,87	5,14	3,57
Riau	5,46	3,16	4,20
Jambi	8,81	3,91	4,32
Sumatera Selatan	8,03	5,08	4,11
Bengkulu	5,72	3,07	4,03
Lampung	7,95	4,15	3,47
DKI Jakarta	9,10	5,11	3,64
Jawa Barat	9,21	4,87	4,06
Jawa Tengah	7,30	3,03	3,33
DI Yogyakarta	7,79	3,53	3,29
Jawa Timur	8,26	4,20	3,34
Bali	8,16	5,81	3,39
Nusa Tenggara Barat	8,11	5,26	5,53
Nusa Tenggara Timur	8,22	5,62	4,31
Kalimantan Barat	10,75	7,53	1,87
Kalimantan Tengah	11,85	6,29	2,78
Kalimantan Selatan	9,95	4,69	5,97
Kalimantan Timur	8,29	4,45	3,81
Sulawesi Utara	9,25	5,38	4,25
Sulawesi Tengah	8,33	4,71	5,19
Sulawesi Selatan	8,31	4,30	4,97
Sulawesi Tenggara	6,01	5,32	5,63
Maluku	7,14	3,50	-1,95
Papua	13,87	7,42	-1,64
Rata-Rata	8,28	4,66	3,47
Stdev	2,12	1,53	1,88

Sumber: dihitung dari data PDRB dari BPS berbagai tahun

Lampiran 4.
Definisi Operasional Variabel yang Digunakan pada Model

Variabel	Keterangan	Satuan Pengukuran
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	Juta Rupiah
CONS	Konsumsi	Juta Rupiah
G	Pengeluaran Pemerintah	Juta Rupiah
I	Investasi	Juta Rupiah
X	Ekspor	Juta Rupiah
M	Impor	Juta Rupiah
Net(X-M)	Net Ekspor	Juta Rupiah
APBD	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Ribu Rupiah
PAD	Pendapatan Asli Daerah	Ribu Rupiah
PAJAK	Pajak Daerah	Ribu Rupiah
EXP	Pengeluaran Pembangunan	Ribu Rupiah
EXR	Pengeluaran Rutin	Ribu Rupiah
Bribery	Bribery Cost	Persen
SDM_D3S3	Proporsi Penduduk yang Lulus Perguruan Tinggi	Persen
D1	Variabel Dummy untuk Desentralisasi Fiskal D1=0 untuk sebelum desentralisasi D1=1 untuk setelah desentralisasi	
IR	Suku Bunga Kredit	Persen
ER	Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar	Rp/US \$
IHK	Indeks Harga Konsumen	
DAPER	Dana Perimbangan 2001: DAU + Bagi Hasil Pajak+Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Transfer Sebelum Desentralisasi yaitu :SDO, Inpres dan Bagi Hasil	Ribu Rupiah
Crisis	Dummy untuk krisis ekonomi (Crisis=0:1984-1996, Crisis=1: 1997-2001)	

Lampiran 5.
Rasio Dana Perimbangan Tahun 2002 Dengan Beberapa Variabel

Daerah	Rasio (%) Dana Perimbangan dengan Beberapa Variabel				Rasio (%) PAD dengan Beberapa Variabel (%)			
	DP/TR	DP/EXR	DP/EXP	DP/EX	PAD/TR	PAD/EXR	PAD/EXP	PAD/EX
N. Aceh	84	200	146	84	3	6	4	3
Sumut	76	111	246	76	13	18	40	13
Sumbar	77	113	272	80	10	14	34	10
Riau	72	183	124	74	7	18	12	7
Jambi	84	123	266	84	9	12	27	9
Sumsel	79	115	250	79	11	16	34	11
Babel	80	120	238	80	12	18	35	12
Bengkulu	90	111	482	90	5	7	29	6
Lampung	86	112	436	89	8	10	38	8
Jakarta	40	65	103	40	38	62	98	38
Jabar	74	102	285	75	19	26	72	19
Banten	70	105	211	70	21	31	62	21
Jateng	80	109	386	85	13	18	65	14
DIY	76	112	506	92	15	22	101	18
Jatim	74	107	236	74	15	21	47	15
Bali	57	100	241	71	29	51	122	36
NTT	86	121	291	86	10	14	33	10
NTB	88	121	319	88	5	7	18	5
Kalbar	85	122	271	84	9	13	29	9
Kalteng	84	133	225	84	8	12	20	8
Kalsel	84	118	285	84	10	14	34	10
Kaltim	72	156	128	70	7	16	13	7
Sulut	89	103	658	89	9	10	65	9
Gorontalo	91	154	226	91	6	10	15	6
Sulteng	90	125	316	90	6	9	23	6
Sulsel	83	117	288	83	10	14	34	10
Sultra	89	112	415	88	7	8	31	7
Maluku	89	118	350	88	2	2	7	2
Maluku Utara	83	146	196	84	2	4	5	2
Papua	92	175	195	92	2	4	5	2
RATA-RATA	80	124	286	81	11	16	39	11

Keterangan :

DP/TR = Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah

DP/EXR = Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Rutin Daerah

DP/EXP = Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Pembangunan

DP/EX = Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pengeluaran

PAD/TR = Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

PAD/EXR = Rasio PAD terhadap Belanja Rutin Daerah

PAD/EXP = Rasio PAD terhadap Belanja Pembangunan

PAD/EX = Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran

Sumber : Diolah dari data APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota 2002, DJPKPD, Departemen Keuangan